

POHON KINERJA
BIRO PERSIDANGAN I DPD RI

Terwujudnya peran DPD RI sesuai aspirasi daerah
IK : Nilai aspirasi masyarakat dan daerah yang menjadi produk DPD RI

Meningkatnya kualitas legislasi RUU
IK : 1) Nilai kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI (K_{11}), 2) Nilai kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (K_{12}), 3) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai APBN (K_{13}), 4) Nilai kualitas pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama (K_{14})

Meningkatnya kualitas pengawasan
IK : 1) Nilai kualitas hasil pengawasan sesuai ASMASDA (K_{21}), 2) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (K_{22}), 3) Nilai kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (K_{23})

PK Pimpinan Lembaga /
Eselon Ia / Kinerja Strategis

PK Pimpinan Lembaga /
Eselon Ia / Kinerja Strategis

Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU (P_{11}), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU (P_{12})

Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P_{13}), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P_{14})

Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama (P_{15}), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama (P_{16})

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{21}), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{22})

Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{23}), 2) Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P_{24})

Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai kualitas bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (P_{25}), 2) Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA (P_{26})

PK Eselon I.b/ Kinerja Taktis

PK Eselon I.b/ Kinerja Taktis

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K_{11})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (K_{12})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama sesuai standar yang ditetapkan (K_{13})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai tertimbang uji petik sesuai standar untuk pengawasan atas pelaksanaan UU (K_{21}), 2) Nilai tertimbang masukan terhadap RUU inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU Usul pemerintah atau DPR, masukan atau perubahan kebijakan Pemerintah (K_{22}), 3) Nilai tertimbang kegiatan sosialisasi, dialog dan FGD hasil produk hukum DPD RI (K_{23}), 4) Indeks Reformasi Hukum (K_{24}), 5) Nilai tertimbang pengelolaan kerumahahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI (K_{25})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai standar yang ditetapkan (K_{23})

Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA
IK : 1) Nilai tertimbang masukan untuk penyempurnaan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan untuk harmonisasi legislasi pusat dan daerah (K_{24})

PK Eselon II / Kinerja Operasional

PK Eselon II / Kinerja Operasional

Tersusunnya rumusan rancangan UU
IK : 1) Uji sah, NA dan draft RUU dengan kalangan akademis, 2) Finalisasi RUU

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
IK : 1) Kajian sesuai standar tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis RIA dan ROCCPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersusunnya hasil analisa kajian sesuai standar untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama
IK : 1) Kajian sesuai standar tentang gambaran hukum nasional dan ketatanegaraan, 2) Analisis RIA dan ROCCPI, 3) Finalisasi oleh tim perumus

Tersedianya uji petik pengawasan atas pelaksanaan UU
IK : 1) Peninjauan lapangan, 2) Pembahasan melalui FGD, dll, 3) Perumusan finalisasi hasil pengawasan lapangan

Tersedianya bahan masukan terhadap RUU inisiatif DPD RI serta pandangan dan pendapat atas RUU usul Pemerintah atau DPR, masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah
IK : 1) Uraian perubahan kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan (PP, Peraturan Menteri, SOP, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis atau uraian perubahan RUU

Tersedianya masukan terhadap RUU inisiatif untuk pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA, 2) Penetapan RUU inisiatif DPD RI

Terlaksananya pengelolaan kerumahahtanggaan dan kerjasama parlemen DPD RI

Tersedianya masukan terhadap RUU inisiatif untuk pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA, 2) Penetapan RUU inisiatif DPD RI

Terukurnya efektifitas pelaksanaan UU, dampak yang ditimbulkan serta kemampuannya
IK : 1) Kajian dampak atas pelaksanaan UU, 2) Perumusan usulan perubahan RUU inisiatif DPD RI

Terhimpunnya ASMASDA terhadap hasil monitoring dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai dengan sasaran pemantauan
IK : 1) Pengkajian tinjauan pendukung dalam rangka pemantauan dan evaluasi berdasarkan amotasi selama 1 (satu) Tahun sejak kali yang bersumber dari Anggota maupun Kantor Daerah, 2) Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, 3) Perumusan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda

Tersedianya masukan sebagai penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
IK : 1) Kajian harmonisasi legislasi pusat dan daerah, 2) Perumusan masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah

Tersedianya masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah
IK : 1) Kajian harmonisasi legislasi pusat dan daerah, 2) Perumusan masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah

Output

Output